

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma baru yang berkembang didalam masyarakat modern mengenai kinerja instansi pemerintah sudah semakin kritis. Masyarakat modern mulai menginginkan adanya keterbukaan, peningkatan efektivitas dan efisiensi didalam berbagai bidang, tanggungjawab yang jelas dan kewajaran. Paradigma tersebut di Indonesia disebut sebagai *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Paradigma tersebut mendorong adanya kemajuan manajemen keuangan daerah.

Setiap instansi pemerintahan memiliki anggaran yang biasa disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam penyusunan APBN dan APBD, diperlukannya tanggungjawab yang jelas, kewajaran dan keterbukaan agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam membuat APBN atau APBD diperlukannya penganggaran yang baik dan benar sehingga pada saat penyusunan APBN atau APBD, anggaran yang diberikan merupakan anggaran yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Menurut Nafarin (2004:5), “Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan”. Komponen penting dalam fungsi perencanaan adalah dengan membuat anggaran.

Menurut M.Munandar (2001:1) Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan sedangkan efektivitas biaya operasional merupakan rasio keluaran terhadap masukan biaya yang telah ditentukan atau menggunakan biaya yang lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama atau jumlah yang lebih besar dari yang telah direncanakan dan yang diterapkan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, penggunaan sumber daya dan pembentukan sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil yang aktual.

Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di Prov. Sulawesi Tenggara, yang dalam melakukan penganggaran dilakukan berdasarkan *Good Governance*. Di dalam penyusunan anggaran, Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara bagian Program sering kali dihadapkan kepada permasalahan kurangnya APBD yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah disusun untuk selama satu periode.

Hal ini menyebabkan bagian Perencanaan harus berusaha keras dalam mengefektifkan segala biaya yang ada di anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu menekankan pada keefektivitasan dalam pengendalian biaya operasional. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan data kuantitatif dan mendiskripsikan pada pihak yang terkait dengan penyusunan anggaran di. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran biaya memiliki pengaruh terhadap efektif biaya operasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“PENGARUH ANGGARAN BIAYA TERHADAP EFEKTIVITAS BIAYA OPERASIONAL (Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah, maka perumusan masalah sebagai berikut “Apakah Anggaran Biaya berpengaruh terhadap Efektivitas Biaya Operasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mencari informasi tentang pengaruh anggaran biaya terhadap efektivitas biaya operasional sebagai alat bantu untuk menilai kinerja instansi bagian penganggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran biaya terhadap efektivitas biaya operasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam masalah studi pengaruh anggaran biaya terhadap efektivitas biaya operasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara
 - b. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir program Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi instansi pemerintah
 - a. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak sub bagian penganggaran dalam menyusun anggaran biaya untuk mencapai efektivitas pada biaya operasional yang lebih baik.
 - b. Diharapkan dapat menjadi salah satu informasi yang bermanfaat bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Tenggara sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam penggunaan anggaran biaya di masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat khususnya di lingkungan perguruan tinggi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang anggaran khususnya anggaran biaya dan pengaruhnya terhadap efektivitas biaya operasional.
 - b. Sebagai referensi untuk pengkajian masalah yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Neagara berkewajiban untuk menjalankannya dengan baik. Dalam menjalankan mandatnya, Pemerintah menyusun program-program dan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. Penyusunan program dan rencana kerja ini dilakukan supaya kegiatan dan aktivitas pemerintah terstruktur dan terkoordinasi sehingga hasil akhir dapat dikontrol, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Program dan rencana kerja yang disusun oleh pemerintah lebih dikenal dengan istilah anggaran.

Menurut Mulyadi (2001:488) pengertian anggaran adalah :

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.”

Sedangkan menurut Deddi Nordiawan, dkk (2007:20) mendefinisikan anggaran sebagai berikut :

“Sebuah rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lainnta yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perencanaan yang dikembangkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tanggungjawabnya kepada publik.

Menurut (Rudianto 2009, h.5) secara umum seluruh fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Perencanaan (*Planning*).
- 2) Fungsi Pengorganisasian (*organizing*).
- 3) Fungsi Menggerakkan (*Actuating*).
- 4) Fungsi Pengendalian (*Controlling*).

Penyusunan anggaran yang ditetapkan pada instansi pemerintah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 adalah anggaran berdasarkan pendekatan kinerja yang mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik disisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah anggaran biaya yang baik dan menyeluruh maka dalam proses awal penyusunan anggaran biaya harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap penyusunan anggaran biaya sehingga arah dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Syarat-syarat penyusunan anggaran menurut Marwan Asrri (2003:7) sebagai berikut :

1. Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis.
2. Luwes, artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mudah berubah.
3. Kontinyu, artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus.
4. Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.
5. Mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada para anggotanya.
6. Mempunyai kemampuan untuk mendorong adanya partisipasi.

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatu organisasi tertentu maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

Menurut Mardiasmo (2005:132) menyatakan pengertian efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”.

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional serta untuk mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya operasional maka diperlukan perencanaan dan pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan tercapai.